



**PIDATO
PENJABAT GUBERNUR DKI JAKARTA
PADA
RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA
DALAM RANGKA
PENYAMPAIAN JAWABAN
ATAS
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025**

Oleh :

**Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd.
Pj. Gubernur DKI Jakarta**

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Senin, 11 November 2024

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu, Namó Buddhaya, Salam kebajikan.

- Yth. - Saudara Ketua dan Para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Para Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;
 - Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
 - Para Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI, Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
 - Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, atau yang mewakili;
 - Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - Hadirin yang saya hormati.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka *Penyampaian Jawaban Pejabat Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025*.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan yang saya hormati,

Mengawali pidato ini, saya beserta jajaran Eksekutif menyampaikan terima kasih atas pertanyaan, apresiasi, dukungan, saran dan pendapat yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, terhadap materi Raperda ini.

Eksekutif berusaha menanggapi seluruh pandangan umum yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi secara lengkap dan menyeluruh. Namun, mengingat banyaknya pertanyaan, apresiasi,

dukungan, dan saran yang disampaikan, perkenankan saya menyampaikan hal-hal yang bersifat strategis. Sedangkan terhadap materi yang bersifat teknis, dan memerlukan pembahasan lebih lanjut, kiranya dapat dibahas pada kesempatan berikutnya.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2025 merupakan kelanjutan dari kesepakatan bersama antara Eksekutif dengan Legislatif terhadap KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2025.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Pada **bagian pertama**, Eksekutif akan menyampaikan tanggapan terkait sekolah swasta gratis; bantuan sosial berupa KJP dan KJMU; makan bergizi gratis; penyediaan hunian layak; penyediaan ruang terbuka hijau; transportasi publik; penanganan stunting; penanggulangan banjir; serta penanganan sampah.

- **Terkait sekolah swasta gratis**, sebagaimana pertanyaan, saran dan masukan yang disampaikan oleh *Fraksi PKS, Fraksi Partai PDI Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai PKB, Fraksi Partai Demokrat-Perindo dan Fraksi PSI*, dapat saya sampaikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta fokus terhadap program sekolah swasta gratis dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan secara merata bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saat ini, Eksekutif sedang menyusun kajian dan regulasi yang mendukung pelaksanaannya.
- **Terkait bantuan sosial berupa KJP dan KJMU**, sebagaimana pertanyaan, saran dan masukan yang disampaikan oleh *Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKB, Fraksi Partai Demokrat-Perindo dan Fraksi PSI*, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat melalui sektor pendidikan, salah satunya melalui pemberian

bantuan sosial berupa KJP dan KJMU, berdasarkan pemadupadanan data penerima manfaat dengan verifikasi dan evaluasi data DTKS serta P3KE secara berkala.

- **Terkait makan bergizi gratis**, sebagaimana pertanyaan, saran dan masukan yang disampaikan oleh *Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKB dan Fraksi PSI*, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat mendukung program pemerintah pusat dalam hal pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG). Penerapan program ini masih menunggu petunjuk pelaksanaan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Namun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan uji coba program ini melalui program Pemberian Makanan Tambahan berupa produk makanan berbahan pangan lokal tinggi protein hewani, dengan melibatkan UMKM.
- **Terkait Penyediaan Hunian Layak**, sebagaimana pertanyaan, saran dan masukan yang disampaikan oleh *Fraksi PKS, Fraksi Partai PDI Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra,*

Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PSI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan akses kepemilikan perumahan yang layak aman dan terjangkau bagi masyarakat, **melalui penyediaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa)** bagi masyarakat Jakarta yang belum memiliki rumah dan masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Eksekutif juga **mengembangkan pembangunan rumah tidak layak huni** melalui Perbaikan Rumah dan Konsolidasi Tanah bekerja sama dengan para pemangku kepentingan dan BPN. Dalam hal **akses pembiayaan Hunian Terjangkau Milik**, program Fasilitasi Pembiayaan Perolehan Rumah (FRRR) diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat Jakarta mendapatkan rumah. Terhadap **RW kumuh**, kegiatan peningkatan kualitas permukiman akan terus dilakukan agar kantong-kantong kumuh di DKI Jakarta terus berkurang.

- **Terkait Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**, sebagaimana pertanyaan, saran dan masukan yang disampaikan oleh *Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKB, Fraksi Partai Demokrat-Perindo dan Fraksi PSI*, dapat disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya dalam pengelolaan RTH sesuai dengan target RPD yaitu 0,009 % atau setara 6 Ha per tahun. Selain itu dilakukan peningkatan kualitas RTH, melalui pembangunan, penataan dan pemeliharaan RTH. Desain RTH saat ini sudah menyesuaikan dengan fungsi RTH lainnya yaitu ruang ekologi, rekreasi, mitigasi bencana, pengendali banjir, interaksi sosial serta pengembangan edukasi, olahraga dan budaya.
- **Terkait Transportasi Publik**, sebagaimana pertanyaan, saran dan masukan yang disampaikan oleh *Fraksi PKS, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi PAN dan Fraksi Partai Demokrat-Perindo*, dapat saya sampaikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya

meningkatkan cakupan layanan angkutan umum dengan meningkatkan jumlah jaringan transportasi antara lain melalui pembangunan konstruksi ekstensifikasi jaringan MRT Jakarta, LRT Jakarta serta Transjakarta. Beberapa upaya dalam mewujudkan integrasi transportasi melalui 6 (enam) dimensi integrasi antara lain integrasi fisik, integrasi layanan, integrasi rute/lintasan, integrasi sistem pembayaran, integrasi tarif serta integrasi data dan informasi. Cakupan layanan angkutan umum sampai dengan bulan Oktober 2024, telah mencapai 84,6 luas wilayah atau 90,5% populasi masyarakat Jakarta.

- Terkait **penanganan stunting** sebagaimana disampaikan oleh *Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Demokrat-Perindo* disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengalokasikan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berupa produk makanan berbahan pangan lokal tinggi protein hewani.

- Terkait **penanggulangan banjir** sebagaimana disampaikan oleh *Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKB, Fraksi Partai Demokrat-Perindo dan Fraksi PSI*, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan kapasitas sungai dan saluran drainase melalui pengurasan dan pengerukan sedimen. Eksekutif berkomitmen melaksanakan penyelesaian pembangunan tanggul pengaman pantai Fase A *National Capital Integrated Coastal Development* (NCICD) sepanjang 12 km sebagai upaya mengatasi dampak banjir rob di wilayah pesisir.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga melakukan normalisasi sungai untuk peningkatan kapasitas melalui pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, dan koordinasi yang intensif dengan pemerintah pusat terkait dengan penentuan segmen sungai yang akan dinormalisasi. Selain itu, dilakukan pembangunan waduk/situ/embung di berbagai lokasi potensial yang berfungsi sebagai

pengendali banjir dan sumber air baku untuk air bersih. Salah satunya adalah Situ Babakan yang telah dibangun Instalasi Pengolahan Air bersih dan pipa distribusi untuk masyarakat sekitar.

- Terkait **Penanganan Sampah**, menanggapi pertanyaan, saran dan masukan dari ***Fraksi PKS, Fraksi PKB dan Fraksi PSI***, dapat saya jelaskan bahwa tanggung jawab pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat sesuai amanat peraturan perundang-undangan melalui pemilahan dan pengurangan sampah.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Pada **bagian kedua**, Eksekutif menyampaikan tanggapan terhadap pemandangan umum Fraksi-Fraksi yang berkaitan dengan **Pendapatan Daerah**.

- Menanggapi pertanyaan, saran dan masukan ***Fraksi PKS, Fraksi PKB, Fraksi PAN dan Fraksi Partai Demokrat-Perindo***, terkait upaya **peningkatan pajak daerah**, Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta melaksanakan beberapa kebijakan berupa:

1. Perluasan basis perpajakan dengan mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi;
2. Peningkatan kepatuhan melalui pemanfaatan teknologi sistem perpajakan, *joint program*, dan penegakan hukum;
3. Peningkatan rasio perpajakan melalui harmonisasi kebijakan perpajakan antara pemerintah pusat dan daerah;
4. Pemberian insentif fiskal daerah yang terarah dan terukur guna mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi; dan
5. Penguatan organisasi dan SDM sejalan dengan perkembangan teknologi serta dinamika perekonomian.
6. Pengembangan digitalisasi pelayanan pemungutan pajak daerah dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat sebagai wajib pajak.

- Menanggapi pertanyaan, saran dan masukan *Fraksi PKB dan Fraksi PAN* terkait optimalisasi dan strategi **peningkatan retribusi daerah**, dapat disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan beberapa kebijakan berupa:
 1. Pendataan objek retribusi baru oleh seluruh Perangkat Daerah (PD) pemungut retribusi agar dapat menambah pendapatan;
 2. Pembuatan kajian atau naskah akademis untuk mitigasi permasalahan yang timbul akibat adanya UU Daerah Khusus Jakarta yang akan menambah Jenis Layanan Retribusi;
 3. Integrasi sistem untuk Retribusi BLUD sebagai pencatatan Retribusi;
 4. Pembuatan regulasi untuk para Perangkat Daerah Pemungut agar termotivasi dalam memungut retribusi; dan
 5. Pengembangan Retribusi *Online System* untuk kemudahan user dan wajib retribusi.

- Menanggapi pertanyaan *Fraksi PSI* terkait **Retribusi Layanan Kebersihan Rumah Tinggal**, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengakomodasi Pemungutan Retribusi Layanan Kebersihan Rumah Tinggal ke dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Terkait mekanisme pemungutannya akan diatur dalam Pergub Tata Cara Pemungutan Retribusi Rumah Tinggal.
- Menanggapi pertanyaan *Fraksi Partai Nasdem* terkait kontribusi dan pelayanan BUMD yaitu mengenai peningkatan kapasitas pelayanan PDAM melalui penyediaan air bersih yang lebih merata dan stabil di seluruh kawasan Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sependapat dengan saran dari Fraksi Partai Nasdem untuk terus mendorong upaya peningkatan cakupan layanan PAM Jaya hingga tercapai target pelayanan air perpipaan 100% pada tahun 2030.

- Menanggapi pertanyaan dari *Fraksi PKS, Fraksi Partai Nasdem dan Fraksi Partai Golkar* terkait **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah** dapat saya sampaikan:
 - a. Bahwa Aset-aset milik Pemprov DKI Jakarta utamanya digunakan untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan Aset yang dapat dikerjasamakan adalah aset-aset *idle* yang tidak digunakan untuk pelayanan masyarakat oleh PD/UKPD. Terkait target penerimaan dari pemanfaatan BMD setiap tahunnya telah disesuaikan dengan potensi pemanfaatannya berdasarkan peraturan mengenai pengelolaan BMD.
 - b. Mengenai Penurunan Pendapatan BLUD, dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat beberapa Pendapatan BLUD yang menjadi objek retribusi daerah yang sebelumnya tercatat pada kelompok Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Dengan demikian Pendapatan BLUD pada Raperda APBD TA 2025 tercatat pada Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

- Menanggapi pertanyaan *Fraksi PAN* mengenai diversifikasi sumber pendapatan dan mengurangi ketergantungan pada transfer pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sependapat terhadap pentingnya kemandirian ekonomi daerah. Oleh karena itu, Eksekutif terus berupaya melakukan diversifikasi sumber pendapatan melalui optimalisasi kebijakan Pendapatan Asli Daerah.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Pada **bagian ketiga**, terkait dengan **Belanja Daerah**, disampaikan sebagai berikut:

- Menanggapi pertanyaan, saran dan masukan dari *Fraksi PKS, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem dan Fraksi PSI* terkait peningkatan fasilitas pembangunan gedung sekolah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selalu mengupayakan

penyediaan fasilitas sarana pendidikan, peningkatan kualitas gedung pendidikan dan usaha pemenuhan sekolah pada wilayah yang belum terdapat sekolah, baik melalui kegiatan rehab maupun pembangunan unit sekolah baru.

- Menanggapi pertanyaan *Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKB dan Fraksi Partai Demokrat-Perindo* terkait peningkatan layanan kesehatan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengoptimalkan alokasi anggaran untuk penyediaan fasilitas dan peralatan kesehatan dengan memenuhi standar kebutuhan layanan unggulan stratifikasi sesuai Peraturan Menteri Kesehatan. Eksekutif juga memberikan perhatian terhadap peningkatan layanan kesehatan melalui pembuatan *Grand Design* pengembangan RSUD yang mempertimbangkan kebutuhan layanan pasien dan kompetensi Rumah Sakit, sehingga diharapkan pasien memperoleh layanan kesehatan dengan cepat dan tepat.

- Menanggapi saran dan masukan dari ***Fraksi PSI*** terkait Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selalu berupaya melaksanakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, diantaranya melalui pengembangan Unit Informasi Layanan Sosial (UILS) di setiap kabupaten/kota administrasi di wilayah DKI Jakarta dalam rangka memenuhi layanan kegiatan bimbingan psikososial dan juga pendampingan disabilitas.
- Menanggapi saran dan masukan dari ***Fraksi Partai Nasdem*** terkait kestabilan dan ketahanan pangan, dapat disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi DKI Jakarta secara rutin dan situasional (dalam hal ini Nataru) melakukan pemantauan harga pangan di tingkat pedagang grosir dan pedagang eceran.
- Menanggapi pertanyaan, saran dan masukan ***Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi PSI***, terkait Dana Operasional RT/RW, LMK, FKDM, Dasawisma, Jumantik, Guru PAUD dan Marbot Masjid, dapat disampaikan bahwa pemberian

uang operasional/honorarium berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

- Menanggapi saran dan masukan *Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem dan Fraksi PKB* terkait penanganan pengangguran, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PKB) yang berlisensi/tersertifikasi BNSP untuk semua warga Jakarta, baik pelatihan di Kantor/gedung PPKD maupun pelatihan jemput bola dengan menggunakan *Mobile Training Unit (MTU)*. Selain itu, dijalin kesepakatan kerja dengan Jepang berupa pemagangan di Jepang dengan pola SO (*Sending Operation*) untuk Tenaga Kerja SSW (*Specified Skilled Worker*) atau tenaga kerja berketerampilan khusus.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Pada **bagian keempat**, Eksekutif menanggapi pandangan umum Fraksi yang berkaitan dengan **Pembiayaan Daerah**.

Menanggapi pertanyaan dari *Fraksi Partai PAN* mengenai Pembiayaan dapat saya sampaikan:

- a. Bahwa proporsi terbesar sumber pendanaan belanja pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berasal dari Pendapatan Asli Daerah berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sedangkan proyeksi SiLPA pada Raperda APBD TA 2025 hanya sebesar Rp4,9 triliun atau 6,07 persen dari total Pendapatan Daerah.
- b. Bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjaga rasio kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, mengukur batas kumulatif pinjaman yang diajukan, yaitu 75 % dari penerimaan umum tahun sebelumnya dan *Debt-Service Coverage Ratio* (rasio cakupan layanan utang atau kecukupan pendapatan untuk membayar utang) minimal 2,5 kali. Dapat diinformasikan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki tunggakan pinjaman dan selalu membayar kewajiban pinjaman secara tepat waktu, hal ini terbukti dengan penghargaan yang diterima dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebagai debitur terbaik.

Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat,

Demikian penyampaian jawaban secara umum Eksekutif atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap *Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025*.

Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat membantu memperlancar pembahasan sehingga Rancangan Peraturan Daerah ini dapat disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan melalui Badan Musyawarah.

Saya bersama jajaran Eksekutif menyampaikan terima kasih kepada Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Dewan atas perhatian terhadap penjelasan yang telah disampaikan.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyukseskan pembangunan kota serta mewujudkan **Jakarta sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global**.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Om Shanti Shanti Shanti Om, Namó Buddhaya.*

Jakarta, 11 November 2024

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Dr. Feguh Setyabudi, M.Pd.